

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sudah biasa terjadi di setiap daerah. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Kemiskinan terjadi tidak hanya pada daerah yang berkembang, namun daerah maju juga terdapat terjadi kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi karena adanya tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengangguran, dan banyak hal-hal lain yang mempengaruhinya. Kondisi kemiskinan pada saat ini semakin meningkat karena ketidakstabilan kondisi ekonomi sehingga warga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Pada masalah kemiskinan ini pemerintah harus bisa memberikan penanganan terhadap masalah tersebut seperti menyejahterakan warganya. Kesejahteraan warga dapat mempengaruhi kemajuan suatu daerah karena dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan dengan kesejahteraan memiliki hubungan yang sangat erat. Di setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyejahterakan warganya. Pemerintah dapat memberikan beberapa bantuan kepada warganya yang termasuk dalam kriteria warga miskin. Pemerintah berupaya menyejahterakan warga miskin agar tidak terjadi kemiskinan pada daerahnya.

Pemerintah melakukan penanganan kemiskinan dengan memberikan bantuan terhadap keluarga yang memiliki kriteria tidak mampu atau keluarga miskin. Bantuan untuk keluarga miskin harus yang diberikan kepada keluarga yang benar-benar termasuk pada kriteria miskin. Dengan adanya bantuan tersebut, keluarga miskin tidak akan mengalami kemiskinan karena dari bantuan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan warganya. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang dan sembako. Pemerintah harus melakukan pemerataan terhadap bantuan keluarga miskin agar semua warga miskin mendapatkan keadilannya. Pemerintah mengelompokkan keluarga miskin dan keluarga mampu untuk

penyaluran dana bantuan kepada keluarga miskin dengan melakukan sensus penduduk.

Proses pendataan sensus penduduk masih menggunakan manual data sehingga sering terjadi kesalahan dalam menentukan kriteria keluarga miskin yang layak untuk diberikan bantuan dan juga dapat melakukan pemalsuan data sehingga bantuan sering salah diberikan pada keluarga mampu atau keluarga yang tidak termasuk pada kriteria tidak miskin. Berdasarkan dari permasalahan tersebut pemerintah harus tepat dalam mengolah data sensus agar bantuan rata terbagi untuk keluarga miskin. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi dalam menentukan keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, harus ada sistem pendukung keputusan agar mempermudah dalam menentukan kelayakan setiap warga dalam mendapatkan bantuan.

Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan pada suatu permasalahan. Sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan keluarga miskin dapat mengatasi pemilihan keluarga miskin yang tidak akurat dan melakukan pemerataan pemberian bantuan untuk keluarga yang benar-benar dari kriteria keluarga miskin. Dalam proses tersebut diperlukan beberapa parameter untuk mendukung keputusan pada sistem pendukung keputusan tersebut. Sistem pendukung keputusan ini memudahkan pemerintah dalam penentuan keluarga miskin atau keluarga yang tidak mampu. Dalam proses penyeleksian data pada sistem pendukung keputusan tersebut metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode tersebut melakukan pemecahan masalah secara hirarki sesuai kriteria yang dipilih pada sistem pendukung keputusan. Dari sistem pendukung keputusan tersebut berguna untuk menyeleksi data sensus untuk diberikan bantuan pemerintah. Sistem pendukung keputusan ini diharapkan bisa mendapatkan ke akuratan data kelayakan penerima bantuan. Jika terdapat data yang tidak akurat maka bantuan akan dicabut dan akan diberikan kepada keluarga miskin lainnya yang sesuai dengan kriteria keluarga miskin.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dari tugas akhir ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan untuk mengidentifikasi kelayakan penerima bantuan?
- b. Bagaimana penerapan metode Analytical Hierarchy Process(AHP) pada sistem pendukung keputusan untuk mengidentifikasi kelayakan penerima bantuan?
- c. Bagaimana tingkat akurasi keakuratan kelayakan penerima bantuan menggunakan metode AHP?

## 1.3 Batasan Masalah

Beberapa Batasan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process(AHP).
- b. Studi kasus yang digunakan yaitu pengidentifikasian dan penentuan warga penerima bantuan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- c. Pengidentifikasian menggunakan data penerima bantuan di kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- d. Pengidentifikasian berfokus pada penentuan kelayakan penerima bantuan dengan tingkat kelayakan yang digunakan, yaitu “Layak” dan “Tidak Layak”.

## 1.4 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah:

- a. Merancang sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan dengan menerapkan metode Analytical Hierarchy Process(AHP).
- b. Mengidentifikasi kelayakan penerima bantuan di Kecamatan Asembagus.

- c. Mendapatkan keakuratan data sesuai tingkat akurasi kelayakan penerimaan bantuan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process(AHP).

### **1.5 Manfaat**

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

- a. Mendukung pemilihan penerima bantuan di Kecamatan Asembagus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Mempersingkat dan mempercepat proses pemilihan penerima bantuan.
- c. Mendukung untuk pengidentifikasian kelayakan warga penerima bantuan.
- d. Memudahkan pengguna untuk menentukan penerima bantuan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process(AHP).
- e. Mempermudah pendataan bagi calon penerima bantuan selanjutnya.